

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 /PMK.06/2014
TENTANG PENILAI INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

### KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

### TENTANG

PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

M	enim	bang
***	CILLIA	Dans

- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas penilaian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diperlukan pengangkatan Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

### Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)...;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) ......;
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...;
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor......(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
  - 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...... (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan).....;
  - 7. .....

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

PERTAMA

: Mengangkat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KEDUA

: Memberikan Nomor Register Penilai Internal sebagaimana lajur 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan penilaian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT....



KEEMPAT

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Direktur ....... (diisi nama Direktorat terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 6. Kepala Kantor Wilayah ....... (diisi nama Kanwil terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ....... (diisi nama Kantor Pelayanan terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

H



- 3 -

B. FORMAT PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Vo.	Nama/NIP	Pangkat/golongan	ngan Kedudukan Nomor Register 4. 5.										
1.	2.	3.	4.										
		a.n. MENTERI KEUAN DIREKTUR JEND	IGAN REPUBLIK INDO ERAL KEKAYAAN NEG										

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM u.b KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

**GIARTO** 

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 /PMK.06/2014
TENTANG PENILAI INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

### KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

### TENTANG

PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebastugasan Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

### Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)...;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) ......;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor ....... (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan).....;

7																				
1.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

PERTAMA.....



- 2 -

PERTAMA

Membebastugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dari profesinya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur ....... (diisi nama Direktorat terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Kepala Kantor Wilayah ....... (diisi nama Kanwil terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ........ (diisi nama Kantor Pelayanan terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 8. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....

A



B. FORMAT PENGANGKATAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

## PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA No. Nama/NIP Pangkat/golongan Kedudukan 2. a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BACIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO ?



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 / PMK.06 / 201 4
TENTANG PENILAI INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN	MENTERI	KEUANGAN	REPUBLIK	INDONESIA

NOMOR

### **TENTANG**

### PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL

### DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menim	bang

- a. bahwa Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini telah diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

### Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)...;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) .......;
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor......(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...... (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan).....;

7. ......

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

PERTAMA....



- 2. -

PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dari profesinya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya.

**KEDUA** 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Menteri Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur ....... (diisi nama Direktorat terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Kepala Kantor Wilayah ....... (diisi nama Kanwil terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ....... (diisi nama Kantor Pelayanan terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 8. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

......



- 3 -B. FORMAT PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

# PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | No. | Nama/NIP | Pangkat/golongan | Kedudukan | Pemberhentian | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 5. | | | a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTURJENDERAL KEKAYAANNEGARA,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN

GIARTO



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 /PMK.06/2014
TENTANG PENILAI INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PENGETIKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

### TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- bahwa Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara a. yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini .....(diisi diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari kedudukannya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara" atau "berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Penilai Kepatuhan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor..... tanggal..... melakukan terbukti pelanggaran kewajiban dan/atau larangan Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara");
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

### Mengingat

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan)...;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) ......;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Milik Negara)...;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(diisi Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)...;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...... (diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan).....;

7											

MEMUTUSKAN.....



- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

KEKAYAAN NEGARA.

**PERTAMA** 

Memberhentikan tidak dengan hormat Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dari profesinya sebagai Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

**KEDUA** 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Menteri Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Direktur ....... (diisi nama Direktorat terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Kepala Kantor Wilayah ....... (diisi nama Kanwil terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ....... (diisi nama Kantor Pelayanan terkait) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

.....



- 3 -

B. FORMAT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

## PEMBEBASTUGASAN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA No. Nama/NIP Pangkat/golongan Kedudukan Pemberhentian 1. 2. 3. 4. 5.

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001